



LAPORAN KEUANGAN T.A 2023 (AUDITED)

Periode yang berakhir 31 Desember 2023



PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga. Di samping itu laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Medan, 31 Desember 2024

Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Belawan,



M. Mansur, MM

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	19
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	30
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	44
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	50
F. Pengungkapan Penting Lainnya	54
VI. Lampiran dan Daftar	63



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN**

JALAN GABION – BELAWAN SUMATERA UTARA
TELEPON (061) 6961016, FAKSIMILE (061) 6940329
Email : pps_belawan@yahoo.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
Nomor: B.1037/PPS.BLW/TU.210/V/2024

Laporan Keuangan Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan Tahun 2023 *Audited* yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2023 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Medan, 31 Desember 2023

Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Belawan,



MANSUR, MM
NIP 19660312 199103 1 002

Laporan Keuangan Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.372.564.074 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.372.564.074 atau mencapai 74,76 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp1.835.969.000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp19.803.584.383 atau mencapai 95,88 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp20.654.374.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset kewajiban dan ekuitas per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp101.007.310.817 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp14.553.710; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (netto) sebesar Rp99.270.215.125 dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp813.714.112, dan Properti Investasi sebesar Rp908.827.870.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp583.882.645 dan Rp100.426.488.172.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO beban surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa dan surplus/defisit- LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.379.472.171.

sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp25.018.534.637, sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp23.639.062.466). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit sebelum Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp16.115.684 dan Rp 0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp23.622.946.782).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp 107.113.238.635 dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp23.622.946.782). ditambah dengan koreksi nilai asset non revaluasi senilai Rp(3.362.974.747), ditambah dengan lain-lain sebesar Rp.1.757 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.20.299.169.309 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp.100.426.488.172.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023		% thd Angg	2022	
		ANGGARAN	REALISASI		ANGGARAN	REALISASI
PENDAPATAN						
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	1,835,969,000	1,372,564,074	75	589,556,000	951,831,323
JUMLAH PENDAPATAN		1,835,969,000	1,372,564,074	75	589,556,000	951,831,323
BELANJA	B.2.					
Belanja Pegawai	B.3	7,758,098,000	7,739,046,332	100	7,416,150,000	7,353,956,245
Belanja Barang	B.4	9,698,429,000	9,274,127,086	96	5,480,938,000	5,372,322,433
Belanja Modal	B.5	3,197,847,000	2,790,410,965	87	608,654,000	605,157,854
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-		-	-
JUMLAH BELANJA		20,654,374,000	19,803,584,383	96	13,505,742,000	13,331,436,532

II. NERACA

KANTOR PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN NERACA UNTUK PERIODE 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1		-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	1.395.000
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	3.152.600	351.350
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukar	C.7	- 15.763	- 1.757
Piutang Bukan Pajak(NETO)	C.8	3.136.837	349.593
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	5.573.373	4.190.915
Persediaan	C.10	5.843.500	1.745.200
Jumlah Aset Lancar		14.553.710	7.680.708
ASET TETAP			
Tanah	C.11	59.230.499.000	58.984.781.000
Peralatan dan Mesin	C.12	41.470.539.184	42.478.640.075
Gedung dan Bangunan	C.13	11.253.561.612	13.392.873.594
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.14	53.513.271.035	53.057.281.593
Aset Tetap Lainnya	C.15	902.783.500	917.051.942
Konstruksi dalam pengerjaan	C.16	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.17	- 67.100.439.206	- 63.815.953.368
Jumlah Aset Tetap		99.270.215.125	105.014.674.836
Properti Investasi			
Properti Investasi	C.18	1.074.453.000	-
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	C.19	- 165.625.130	-
Jumlah Properti Investasi		908.827.870	-
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.20	-	-
Aset Lain-Lain	C.21	8.994.055.676	10.257.152.700
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lair	C.22	- 8.180.341.564	- 7.504.943.668
Jumlah Aset Lainnya		813.714.112	2.752.209.032
JUMLAH ASET		101.007.310.817	107.774.564.576
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.23		-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.24	20.411.802	16.732.000
Utang yang belum ditagihkan	C.25	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	560.410.843	644.593.941
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		580.822.645	661.325.941
JUMLAH KEWAJIBAN		580.822.645	661.325.941
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	100.426.488.172	107.113.238.635
JUMLAH EKUITAS		100.426.488.172	107.113.238.635
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		101.007.310.817	107.774.564.576

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	1.379.472.171	713.479.740
JUMLAH PENDAPATAN		1.379.472.171	713.479.740
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	7.736.245.082	7.353.604.895
Beban Persediaan	D.3	363.814.150	288.614.487
Beban Barang dan Jasa	D.4	4.887.543.603	3.289.946.230
Beban Pemeliharaan	D.5	1.527.056.166	707.181.723
Beban Perjalanan Dinas	D.6	2.495.294.669	1.201.375.603
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	8.008.565.204	9.044.465.156
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	15.763	1.757
JUMLAH BEBAN		25.018.534.637	21.885.189.851
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		- 23.639.062.466	- 21.171.710.111
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non lancar	D.11	15.764.334	11.599.999
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		76.911.109	11.599.999
Defisit Selisih Kurs		61.146.775	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		351.350	61.586.421
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		16.115.684	73.186.420
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		- 23.622.946.782	- 21.098.523.691
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNB	D.12	-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		- 23.622.946.782	- 21.098.523.691

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1	107.113.238.635	115.322.247.698
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(23.622.946.782)	(21.098.523.691)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	(3.362.972.990)	114.024.839
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	(3.362.974.747)	114.024.839
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	1.757	-
JUMLAH		(3.362.972.990)	114.024.839
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	20.299.169.309	12.775.489.789
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	(6.686.750.463)	(8.209.009.063)
EKUITAS AKHIR	E.6	100.426.488.172	107.113.238.635

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No. 2005/BALAP.071/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Entitas berkedudukan di Jalan Jend. Gatot Subroto Pondok Batu Sarudik Tapanuli Tengah.

Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan berkomitmen dengan visi mengikut kepada Visi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Mendukung Terwujudnya Visi - Misi Presiden dan Wakil Presiden, Yaitu:

Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk “Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan, Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong. Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Meningkatnya produksi perikanan tangkap di perairan laut dan perairan umum Indikator kinerja utama (IKU): meningkatnya volume dan nilai produksi perikanan tangkap yang berasal dari perairan laut dan PUD
- Meningkatnya pendapatan nelayan Indikator kinerja utama (IKU) : meningkatnya pendapatan nelayan
- Meningkatnya Nilai Tukar Nelayan (NTN) Indikator kinerja utama (IKU): meningkatnya NTN

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) melalui Modul Aset dan Modul GL dan Pelaporan. SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis

akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester II TA 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip dasar-dasar konvensi-konvensi aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan. Disamping itu dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran

pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar Aset Tetap Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai

nominal.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/ DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

- c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah jalan/irigasi/jaringan dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus ketinggalan jaman tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset
Lainnya*

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar aset tetap dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan) dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi Hak Paten Sederhana Merk Desain Industri Rahasia Dagang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran Paten Biasa Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20

Hak Cipta Karya Seni Terapan Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga Belanja yang Masih Harus Dibayar Pendapatan Diterima di Muka Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber jenis belanja antara lain :

Uraian	2023	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.835.969.000	1.835.969.000
Jumlah Pendapatan	1.835.969.000	1.835.969.000
Belanja		
Belanja Pegawai	7.758.098.000	7.758.098.000
Belanja Barang	9.698.429.000	9.698.429.000
Belanja Modal	3.197.847.000	3.197.847.000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	20.654.374.000	20.654.374.000

*Realisasi
Pendapatan
Rp1.372.564.074*

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.372.564.074 atau mencapai 74,76 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.835.969.000. Pendapatan Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.372.564.074. Pendapatan ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2023		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.835.969.000	1.372.564.074	74,76
Jumlah	1.835.969.000	1.372.564.074	74,76

Realisasi penerimaan Pajak mengalami kenaikan 0,00 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami kenaikan sebesar 44,20 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.372.564.074	951.831.323	44,20
Jumlah	1.372.564.074	951.831.323	44,20

B.1.1 Penerimaan Pajak

Realisasi Penerimaan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penerimaan Pajak TA 2023 sebesar 0,00 dari TA 2022. Rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Adapun rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Pendapatan Pajak Penghasilan	-	-	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-
Pendapatan BPHTB	-	-	-
Pendapatan Cukai	-	-	-
Pendapatan Pajak Lainnya	-	-	-
Pendapatan Bea Masuk	-	-	-
Pendapatan Bea Keluar	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Pengembalian Pendapatan	-	-	-
Pendapatan Pajak/Bea Cukai	-	-	-

B.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.372.564.074 dan Rp951.831.323. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 44,20 dari TA 2022 setoran sitaan hasil korupsi di tahun 2022 meningkat drastis. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan
(Audited) TA 2023 dan 2022*

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	1.372.564.074	951.831.323	44,20
Jumlah	1.372.564.074	951.831.323	44,20

Sedangkan Rincian PNBPN Lainnya adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian PNBPN Lainnya Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	76.911.109	11.599.999	563,03
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	4.549.840	17.289.394	(73,68)
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	490.206.056	214.068.960	128,99
Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	800.545.719	638.016.549	25,47
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	351.350	46.079.000	(99,24)
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	-	7.000.000	100,00)
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	8.507.421	(100,00)
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	9.270.000	(100,00)
	-	-	-
Jumlah	1.372.564.074	951.831.323	44,20

*Realisasi
Belanja Negara
Rp19.803.584.383*

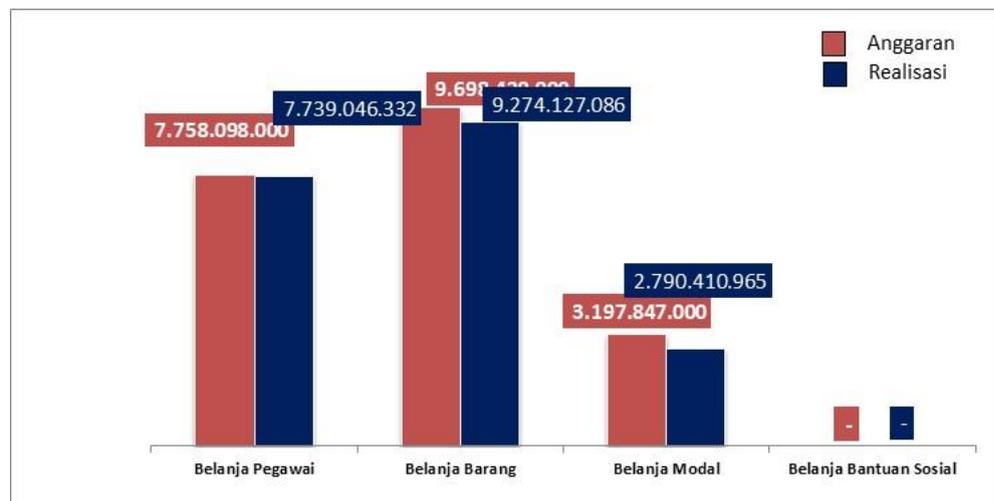
B.2 Belanja

Realisasi Belanja Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan TA 2023 adalah sebesar Rp19.803.584.383 atau 95,88 persen dari anggaran belanja sebesar Rp20.654.374.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Audited) TA 2023

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	7.758.098.000	7.739.046.332	99,75
Belanja Barang	9.698.429.000	9.274.127.086	95,63
Belanja Modal	3.197.847.000	2.790.410.965	87,26
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	20.654.374.000	19.803.584.383	95,88

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan TA 2022, Realisasi Belanja TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 48,55%. Berikut rincian realisasi belanja TA 2023 dan TA 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Pegawai	7.739.046.332	7.353.956.245	5,24
Belanja Barang	9.274.127.086	5.372.322.433	72,63
Belanja Modal	2.790.410.965	605.157.854	361,10
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	19.803.584.383	13.331.436.532	48,55

*Belanja
Pegawai Rp
Rp7.739.046.332*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp7.739.046.332 dan Rp7.353.956.245.

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 5,24 persen dari Realisasi Belanja Pegawai TA 2022. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan pegawai yang pensiun dan mutasi antar satker dan adanya penambahan PPPK sebanyak 15 orang di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan.

Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Gaji Pokok PNS	2.465.151.180	2.522.626.580	(2,28)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	38.867	35.799	8,57
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	176.436.900	185.379.800	(4,82)
Belanja Tunj. Anak PNS	54.127.390	54.313.906	(0,34)
Belanja Tunj. Struktural PNS	35.910.000	57.890.000	(37,97)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	177.000.000	272.363.000	(35,01)
Belanja Tunj. PPh PNS	7.313.543	13.762.088	(46,86)
Belanja Tunj. Beras PNS	144.984.840	147.881.640	(1,96)
Belanja Uang Makan PNS	358.984.000	415.495.000	(13,60)
Belanja Tunjangan Umum PNS	89.630.000	93.615.000	(4,26)
Beban Gaji Pokok PPPK	252.424.300	68.797.300	266,91
Beban Pembulatan Gaji PPPK	7.317	1.878	289,62
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	14.883.480	3.023.280	392,30
Beban Tunjangan Anak PPPK	4.604.544	1.209.312	280,76
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	38.415.000	10.920.000	251,79
Beban Tunjangan Beras PPPK	17.887.740	4.707.300	280,00
Beban Uang Makan PPPK	60.713.000	15.297.000	296,89
Belanja Uang Lembur	165.047.000	43.429.000	280,04
Belanja Uang Lembur PPPK	69.998.000	-	-
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	3.241.751.234	3.380.236.635	(4,10)
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	364.098.050	94.742.200	284,30
	-	-	-
Jumlah Belanja kotor	7.739.406.385	7.385.726.718	4,79
Pengembalian Belanja Pegawai	360.053	31.770.473	(98,87)
Jumlah Belanja	7.739.046.332	7.353.956.245	5,24

Belanja Barang B.4 Belanja Barang

Rp9.274.127.086

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp9.274.127.086 dan Rp5.372.322.433. Belanja barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 72,63 persen dari Realisasi Belanja Barang Tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh kenaikan/penurunan belanja tidak banyak berubah dan adanya kegiatan pendataan PNBK pasca produksi.

Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Barang Operasional	2.972.396.476	2.255.047.169	31,81
Belanja Barang Non Operasional	620.980.750	300.034.534	106,97
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	390.529.299	303.580.248	28,64
Belanja Jasa	1.290.486.575	649.887.717	98,57
Belanja Pemeliharaan	1.505.394.257	692.547.162	117,37
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.495.294.669	1.201.375.603	107,70
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	9.275.082.026	5.402.472.433	71,68
Pengembalian Belanja	954.940	30.150.000	96,83)
Jumlah Belanja	9.274.127.086	5.372.322.433	72,63

Terdapat pengembalian belanja barang senilai Rp954.940 berupa: Kelebihan belanja melebihi saldo UAKPA, yang disebabkan aplikasi SAKTI. Sehingga total realisasi belanja barang netto adalah sebesar Rp9.274.127.086.

Adapun informasi alokasi anggaran belanja untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebagai berikut:

Jumlah pagu anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebesar Rp0

Belanja Modal **B.5 Belanja Modal**

Rp2.790.410.965

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.790.410.965 dan Rp605.157.854. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 361,10 persen TA 2022 disebabkan oleh tahun 2022 hanya ada belanja modal peralatan mesin untuk alat-alat.

Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.122.443.965	605.157.854	250,73
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	226.246.000	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	441.721.000	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	2.790.410.965	605.157.854	361,10
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	2.790.410.965	605.157.854	361,10

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan 0.

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.122.443.965 dan Rp605.157.854. Mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 250,73 persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Hal ini disebabkan karena pada Tahun 2023 adanya pembelian peralatan dan mesin berupa 1 unit Micro Bus/Penumpang 15 S/D 29 Orang /micro bus Isuzu, 2 unit Mini Bus/Penumpang 14 Orang Kebawah/ berupa 1 unit mini Bus Expander dan 1 unit mini bus Toyota innova zenith transfer dari PPS Nizam Zachman, 5 unit sepeda motor dimana 4 unit transferan dari DJPT pusat dan 1 unit pembelian Satker PPS Belawan dari dana PNBPN 2023, 4 unit sepeda listrik, 2 unit baggage trolley/meja dorong untuk makanan, 3 unit lemari penyimpanan, 20 unit lemari besi/metal, 1 unit lemari kayu, 1 unit filing cabinet besi, 11 unit locker, 1 unit alat penyimpanan peralatan kantor lainnya/rak tv besi, 1 unit meja kerja besi//metal, 5 unit meja kerja kayu, 46 unit kursi besi/metal, 4 unit meja rapat, 1 unit kasur/spring bed, 1 unit meja makan besi, 2 unit meja makan kayu, 1 unit meja tv, 2 unit sofa, 4 unit mesin pemotong rumput, 2 unit lemari es,

30 unit AC Split, 2 unit kitchen set, 3 unit TV, 2 unit loudspeaker, 1 unit dispenser, 1 unit wireless mic, 8 unit alat komunikasi telepon lainnya, 6 unit alat komunikasi digital dan konvensional lainnya, 1 unit alat komunikasi lainnya, 1 unit alat komponen pengolah data, 1 unit serial scanner/printer, 4 unit UPS, 2 unit freezer, 1 unit peralatan umum lainnya/mesin cuci, 5 unit PC, 28 unit laptop, 22 unit printer, 2 unit scanner, 2 unit mattress, dan 3 unit peralatan olah raga lainnya.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.122.443.965	605.157.854	250,73
Jumlah Belanja Kotor	2.122.443.965	605.157.854	250,73
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	2.122.443.965	605.157.854	250,73

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 49.900.000 dan Rp 0. Hal ini disebabkan oleh adanya Pembangunan Gazebo di PPS Belawan

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49.900.000	-	-
Jumlah Belanja Kotor	49.900.000	-	-
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	49.900.000	-	-

B.5.4 Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Penambahan nilai Gedung dan Bangunan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp176.346.000 dan Rp 0. Hal ini disebabkan oleh adanya pengembangan dengan KDP Tugu Papan Nama Kantor Syahbandar Batam.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	176.346.000	-	-
Jumlah Belanja Kotor	176.346.000	-	-
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	176.346.000	-	-

B.5.5 Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 217.767.000 dan Rp 0. Hal ini disebabkan adanya Pengembangan dengan KDP Pembangunan Drainase Saluran Air Kantor Syahbandar Batam.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi & Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Modal Irigasi	217.767.000	-	-
Jumlah Belanja Kotor	217.767.000	-	-
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	217.767.000	-	-

B.5.6 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 223.954.000 dan Rp 0. Nilai realisasi tersebut terdiri dari Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan sebesar Rp.217.519.000 yang di dapat dari Penambahan Nilai Jalan Kantor Syahbandar Batam Lewat KDP dan Penambahan Nilai Jaringan Sebesar Rp.6.435.000 Berupa Penambahan Nilai jaringan Listrik di Rumah Dinas Kalabuh.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Modal Lainnya	217.767.000	-	-
Belanja Penambahan Nilai Lainnya	6.435.000	-	-
Jumlah Belanja Kotor	223.954.000	-	-

Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	223.954.000	-	-

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp 0*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	2023	2022
Uang Tunai	-	-
LS belum diSPJkan	-	-
Jumlah	-	-

*Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp1.395.000 . Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Keterangan	2023	2022
Uang Tunai	-	1,395,000
Jumlah	-	1,395,000

*Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp0*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Keterangan	2023	2022
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	-	-
Jumlah	-	-

*Piutang Bukan Pajak
Rp 3.152.600*

C.4 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 3.152.600 dan Rp 351.350.

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang berupa pengembalian atas uang makan PNS bulan desember 2023 sebesar Rp.1.472.850 dan uang makan PPPK bulan desember 2023 sebesar Rp.175.150. Ditambah pengembalian belanja pegawai berupa tunjangan tugas belajar sebesar Rp 1.504.600.

*Rincian Piutang Bukan Pajak
31 Desember 2023 dan 2022*

Keterangan	2023	2022
Piutang Bukan Pajak	3.152.600	351.350
Jumlah	3.152.600	351.350

*Pendapatan Yang
Masih Harus Diterima
Rp5.573.373*

C.9 Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Nilai Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp5.573.373 dan Rp4.190.915.

Pendapatan Yang Masih Harus Diterima merupakan pendapatan sudah menjadi hak, namun belum diterima, dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

*Rincian Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
TA. 2023 dan 2022*

Jenis	2023	2022
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	5,573,373	4,190,915
Jumlah	5,573,373	4,190,915

Rincian Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

1. Jasa tambat dan jasa kebersihan kolam pelabuhan per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.573.373 terdiri dari :
 - ✚ Jasa Tambat sebesar Rp5.081.573;
 - ✚ Jasa kebersihan Kolam pelabuhan sebesar Rp491.800 (*Daftar terlampir*);

Sehingga total Pendapatan Yang Masih Harus Diterima sampai tgl 31 Desember 2023 sebesar Rp5.573.373

Persediaan
Rp5.843.500

C. 10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp5.843.500 dan Rp1.745.200.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan/atau untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan
31 Desember 2023 dan 2022

Jenis	2023	2022
Barang Konsumsi	5,843,500	1,579,300
Barang untuk Pemeliharaan	-	165,900
Suku Cadang	-	-
Bahan Baku	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	5,843,500	1,745,200

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tanah
Rp 59.230.499.000

C.11 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing masing sebesar Rp 59.230.499.000 dan Rp 58.984.781.000. Dengan luas tanah 66.908 M² adalah tanah milik Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan yang berlokasi di Jl. Gabion-Belawan dengan Sertifikat Kepemilikan No. 255 seluas 33.645 M² dan Sertifikat Kepemilikan No. 51 seluas 28.489 M², Sertifikat

Kepemilikan No. 23 seluas 4.774 M². Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	58,984,781,000
Mutasi tambah:	245,718,000
Barang berlebih hasil inventarisasi	245,718,000
Koreksi nilai tim penertiban aset	0
Pembelian	0
Mutasi kurang :	
Revaluasi aset	-
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 31 Desember 2023	59,230,499,000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah 31 Desember 2023

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	32,043	GABION	41,438,905,000
2	33,263	GABION	16,123,601,000
3	1,602	GABION	1,667,993,000
Jumlah			59,230,499,000

Peralatan dan Mesin
Rp41.470.539.184

C.12 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp41.470.539.184 dan Rp42.478.640.075 .

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	42,478,640,075
Mutasi tambah:	2,651,384,965
Pembelian	2,651,384,965
Hibah Barang	
Transfer Masuk	0
Koreksi tambah	0
Mutasi kurang:	3,659,485,856
Penghapusan	3,659,485,856
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2023	41,470,539,184
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	0
Nilai Buku per 31 Desember 2023	41,470,539,184

*Gedung dan
Bangunan
Rp11.253.561.612*

C.13 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp11.253.561.612 dan Rp13.392.873.594 . Nilai Gedung dan Bangunan mengalami penurunan sebesar 15,97 dikarenakan adanya penerimaan aset tetap renovasi sebesar **Rp.966.321.000**, koreksi kesalahan Input IP (koreksi pencatatan nilai berkurang) sebesar **Rp.2.451.235.982** dan Reklasifikasi BMN ke Property sebesar **Rp.1.074.453.000**, dan adanya Mutasi Bertambah dari Pengembangan Melalui KDP sebesar Rp.176.346.000, Penyelesaian Pembangunan langsung sebesar **Rp.49.900.000** dan Transfer masuk dari Pusat berupa perbaikan rumah dinas, parkir, gapura, dan pagar sebesar Rp.1.160.131.000.

*Jalan Jaringan dan
Irigasi Rp
53.513.271.035*

C.14 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 53.513.271.035 dan Rp 53.057.281.593. Mutasi transaksi terhadap Jalan Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	53,057,281,593
Mutasi tambah:	455,989,442
Pengembangan KDP	455,989,442
Mutasi kurang:	-
Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	-
Saldo per 31 Desember 2023	53,513,271,035
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	53,513,271,035

*Aset Tetap Lainnya
Rp 902.783.500*

C.15 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah peralatan dan mesin gedung dan bangunan jalan irigasi dan jaringan.

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp 902.783.500 dan Rp 917.051.942 . Tidak ada mutasi tambah tetapi terdapat mutasi kurang sebesar Rp.14.268.442 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	917,051,942
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi kurang:	
-	14,268,442
Saldo per 31 Desember 2023	917,051,942
Akumulasi Penyusutan	0
Nilai Buku per 31 Desember 2023	902,783,500

Hal ini disebabkan adanya kapitalisasi dari ATR Jalan irigasi dan Jaringan menjadi Aset Induk yaitu Berupa Sumur dan Pompa.

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp 0

C.16 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Nilai Konstruksi dalam pengerjaan mencakup nilai Aset tetap yang masih dalam proses pembangunan yang sampai dengan tanggal neraca belum selesai dibangun.

Mutasi/perubahan Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

*Rincian Mutasi KDP
per 31 Desember 2023*

Mutasi Tambah :	
Saldo Awal	Rp -
KDP Gedung dan Bangunan	Rp -
Jumlah Mutasi Tambah	Rp -
Mutasi Kurang :	
Koreksi Nilai	Rp -
Jumlah Mutasi Kurang	Rp -
Total Mutasi :	Rp -

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
(Rp67.100.439.206)*

C.17 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp67.100.439.206 dan Rp63.815.953.368 . Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
per 31 Desember 2023*

Kode Akun	Nama Akun	2023	2022
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	23,966,341,883	24,978,193,218
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	1,619,747,783	2,363,215,755
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	5,251,600,837	4,758,457,877
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	35,632,346,711	31,128,059,769
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	630,401,992	573,758,307
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	14,268,442
		Rp 67,100,439,206	Rp 63,815,953,368

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Lain-Lain Rp
8.994.055.676

C.21 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp 8.994.055.676 dan Rp 10.257.152.700. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	10,257,152,700
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap ke Aset Lainnya	3,447,854,006
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	4,710,951,030
Saldo per 31 Desember 2023	8,994,055,676
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	8,994,055,676

Adapun rincian Mutasi aset lain-lain Berupa :

Uraian	Mutasi			
	Bertambah		Berkurang	
	Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai
Tanah Persil	0	0	125,000	1,417,252,000
Tanah Non Persil	0	0	781,779	362,328,000
Alat Besar Darat	0	0	1	671,277,200
Alat Bantu	1	1,167,499,300	-	-
Alat Angkutan Darat Bermotor	5	951,519,300	3	54,132,500
Alat Angkutan Apung Bermotor	0	-	-	-
Alat Bengkel Bermesin	2	13,893,000	2	13,893,000
Alat Bengkel Tak Bermesin	1	2,200,000	3	22,500,000
Alat Ukur	0	-	7	31,834,000
Alat Pengolahan	3	14,140,000	4	15,185,000
Alat Kantor	57	287,939,282	108	379,593,354
Alat Rumah Tangga	165	471,954,965	398	692,500,153
Alat Studio	7	58,398,900	17	106,327,100
Alat Komunikasi	0	-	23	81,160,752
Peralatan Komunikasi Navigasi	1	20,500,000	1	20,500,000
Alat Kedokteran	1	2,640,000	2	9,890,000
Alat Kesehatan Umum	0	-	1	61,325,000
Unit Alat Laboratorium	8	23,755,000	15	29,168,000
Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	4	6,395,000	37	45,941,400

Uraian	Mutasi			
	Bertambah		Berkurang	
	Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai
Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	1	3,850,000	1	3,850,000
Alat Khusus Kepolisian	1	3,000,000	2	26,500,000
Komputer Unit	17	228,974,375	38	440,365,375
Peralatan Komputer	14	53,264,885	30	80,952,200
Alat Eksplorasi Topografi	1	37,999,999	1	37,999,999
Alat Pengeboran Mesin	0	-	1	276,000
Alat SAR	6	49,720,000	6	49,720,000
Alat Kerja Penerbangan	1	39,380,000	1	39,380,000
Unit Peralatan Proses/Produksi	2	9,680,000	9	14,079,997
Peralatan Olahraga	2	1,150,000	3	3,020,000
Bangunan Gedung Tempat Kerja	0	-	0	-
Tugu/Tanda Batas	0	-	0	-
Jalan	0	-	0	-
Bangunan Air Irigasi	0	-	0	-
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	0	-	0	-
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan	0	-	0	-
Bangunan Air Bersih/Air Baku	0	-	0	-
Jaringan Air Minum	0	-	0	-
Jaringan Gas	0	-	0	-
Bahan Perpustakaan Tercetak	0	-	0	-
JUMLAH		3,447,854,006		4,710,951,030

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
(Rp8.180.341.564)*

C. 22 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing (Rp8.180.341.564) dan (Rp.7.504.943.668). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Tanah	-	0	0
Peralatan dan Mesin	24,978,193,218	23,966,341,883	1,011,851,335
Gedung dan Bangunan	2,363,215,755	1,619,747,783	743,467,972
Jalan, Irigasi dan Jaringan	36,460,275,953	41,514,349,540	(5,054,073,587)
Aset Tetap Lainnya	14,268,442	165,625,130	(151,356,688)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	0	0
Jumlah	63,815,953,368	67,266,064,336	(3,450,110,968)
Aset Tak Berwujud	0	0	0
Aset Lain-lain	7,504,943,668	8,180,341,564	(675,397,896)

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Utang Muka dari
KPPN Rp0*

C.23 Utang Muka dari KPPN

Saldo Utang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Utang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan

*Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp20.411.802*

C.24 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp20.411.802 dan Rp16.732.000. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah
Belanja pegawai yang masih harus dibayar	-
Belanja barang yang masih harus dibayar	20,411,802
Total	20,411,802

Adapun rincian utang kepada pihak ketiga adalah berupa :

- ✚ Tagihan listrik bulan Desember 2023 sebesar Rp20.368.016;
- ✚ Tagihan telepon bulan Desember 2023 sebesar Rp43.786.

Utang yang belum ditagihkan Rp 0

C.25 Utang Yang Belum Ditagihkan

Utang yang belum ditagihkan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Utang yang belum ditagihkan merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh orang yang meminjam pada pihak yang telah meminjamkan pada jangka waktu tertentu sesuai dengan yang telah disepakati.

Pendapatan Diterima Dimuka Rp563.033.334

C.26 Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp563.033.334 dan Rp644.593.941. Pendapatan Diterima Di Muka adalah pendapatan yang sudah diterima di Kas Negara tetapi belum menjadi hak pemerintah karena masih terdapat kewajiban pemerintah untuk memberikan barang/jasa dikemudian hari sebagai konsekuensi penerimaan pendapatan di Kas Negara tersebut.

Rincian pendapatan yang sudah diterima Per 31 Desember 2023

Uraian	Jumlah
Pendapatan yang sudah diterima	560.410.843
Total	560.410.843

Adapun pendapatan diterima dimuka merupakan tanah dan bangunan yang dipergunakan oleh pihak lain/pengguna jasa. Sehingga total pendapatan diterima dimuka sebesar Rp560.410.843 (Daftar terlampir).

Ekuitas

Rp100.422.368.604

C.27 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp100.422.368.604 dan Rp107.113.238.635. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan

PNBP

Rp1.379.472.171

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp1.379.472.171 dan Rp713.479.740. Pendapatan tersebut terdiri dari :

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan Bidang Perikanan Tangkap	-	-	0,00
Pendapatan Penjualan lainnya	-	-	0,00
Pendapatan Jasa Lainnya	-	-	0,00
Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan	4.549.840	17.289.394	-73,68
Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhanan dan Kenavigasian	-	-	0,00
Pendapatan Jasa Lainnya	-	-	0,00
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan tusi	574.434.154	53.625.312	971,20
Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	800.488.177	642.565.034	24,58
Pendapatan Denda Penyelesaian pekerjaan Pemerintah	-	-	0,00
Jumlah	1.379.472.171	713.479.740	93,34

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya berasal dari Pendapatan Jasa sewa tanah, gedung dan bangunan berupa sewa rumah negara, jasa penggunaan kendaraan, jasa pemakaian peralatan, jasa pengembangan, jasa pemeliharaan prasarana, jasa pas masuk, jasa pengadaan air, jasa kebersihan bangunan, dll.

Beban Pegawai
Rp7.737.749.682

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp7.737.749.682 dan Rp7353604895. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Rincian Beban Pegawai
per 31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3,150,232,667	3,316,097,340	(5.00)
Belanja Uang Makan PNS	357,862,500	415,178,650	(13.81)
Belanja Lembur PNS	165,047,000	43,429,000	280.04
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus PNS	3,241,751,234	3,380,236,635	(4.10)
Belanja Gaji PPPK dan Tunjangan PPPK	328,222,381	88,659,070	270.21
Belanja Uang Makan PPPK	60,537,850	15,613,350	287.73
Belanja Uang Lembur PPPK	69,998,000	-	-
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus PPPK	364,098,050	94,742,200	284.30
Jumlah	7,737,749,682	7,353,956,245	5.22

Beban
Persediaan
Rp363.814.150

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp363.814.150 dan Rp288614487. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2023 dan

2022 sebagai berikut :

Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	2023	2022	Naik/Turun
Beban Persediaan Konsumsi	362,132,230	272,226,537	33
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	-	-	0
Beban Persediaan Suku Cadang	-	-	0
Beban Persediaan Bahan Baku	-	16,048,350	(100)
Beban Persediaan Lainnya	1,681,920	339,600	0
Jumlah	363,814,150	288,614,487	26

*Beban Barang dan Jasa
Rp4.887.543.603*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp4.887.543.603 dan Rp3.289.946.230. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang dan Jasa
31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	2,352,619,372	1,896,060,769	24.08
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	75,223,444	17,744,200	323.93
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	8,278,580	5,860,200	41.27
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	160,176,000	157,560,000	1.66
Beban Barang Operasional Lainnya	376,099,080	177,784,000	111.55
Beban Barang Operasional Pandemi COVID-19	-	38,000	(100.00)
Beban Bahan	561,580,750	261,594,534	114.68
Beban Honor Output Kegiatan	59,400,000	38,850,000	52.90
Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	104,337,339	0.00
Beban Langgan Listrik	244,672,772	223,028,196	9.70
Beban Langganan Telepon	481,923	1,224,024	(60.63)
Beban Sewa	58,660,000	65,754,960	(10.79)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	141,341,562	125,407,008	12.71
Beban Jasa Konsultan	22,200,000	38,500,000	(42.34)
Beban Jasa Profesi	20,900,000	4,680,000	346.58
Beban Jasa Lainnya	805,910,120	161,154,000	400.09
Beban Jasa Penanganan Pandemi COVID-19	0	1,145,000	(100.00)
Jumlah	4,887,543,603	3,289,946,230	48.56

*Beban
Pemeliharaan
Rp1.527.056.166*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.527.056.166 dan Rp707.181.723. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Terjadi kenaikan yang signifikan pada beban pemeliharaan gedung dan bangunan. Hal ini disebabkan karena dilakukannya pemeliharaan untuk beberapa gedung kantor seperti pemeliharaan Mesjid, gedung kantor, balai penyuluhan nelayan, mess operator/mess putri, dll.

*Rincian Beban Pemeliharaan
31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	2023	2022	Naik/Turunan
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	586,094,455	237,226,000	147.06
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0	0	0.00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	690,938,862	411,356,162	67.97
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	59,279,000	0	0.00
Beban Pemeliharaan Jaringan	44,380,000	43,965,000	0.94
Beban Pemeliharaan Irigasi	123,747,000	0	0.00
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	22,616,849	13,274,561	0.00
Beban Persediaan bahan suku cadang	0	1,360,000	0.00
Jumlah	1,527,056,166	707,181,723	115.94

Beban Perjalanan Dinas **D.6 Beban Perjalanan Dinas**

Dinas

Rp2.495.294.669

Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.495.294.669 dan Rp1.201.375.603. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas fungsi dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

*Rincian Beban Perjalanan Dinas
31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	2023	2022	Naik/Turunan %
Beban Perjalanan Biasa	1,998,004,391	906,804,835	120.33
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	46,500,000	36,750,000	26.53
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	102,294,000	47,370,000	115.95
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	348,496,278	210,450,768	65.60
Jumlah	2,495,294,669	1,201,375,603	107.70

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp8.008.565.204*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp8.008.565.204 dan Rp9.044.465.156. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable Assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2,568,574,906	2,418,937,613	0.06
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	268,531,303	309,781,346	-0.15
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	493,142,960	479,548,022	0.03
Beban Penyusutan Irigas	4,499,927,140	5,631,109,224	-0.25
Beban Penyusutan jaringan	56,643,685	57,510,353	-0.02
Beban Penyusutan Properti Investasi	11,558,450	-	1.00
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah	110,186,760	147,578,598	-0.34
Jumlah Penyusutan	8,008,565,204	9,044,465,156	-0.13
Beban Amortisasi Software	-	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	8,008,565,204	9,044,465,156	-

*Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional Rp 0*

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember

2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Kegiatan Non Operasional
31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Pelepasan Aset	0	0	0.00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	0	0	0.00
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	0	0	0.00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan *)	0	0	0.00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0	0	0.00

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp107.113.238.635

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 2023 dan 1 Januari 2022 adalah masing-masing sebesar Rp107.113.238.635 dan Rp 115.322.247.698.

Defisit LO

(Rp23.627.066.350)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar (Rp23.627.066.350) dan (Rp21.098.523.691) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional surplus/defisit kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai

Aset Rp 0

E.3 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp 0*

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang mengakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0.

*Rincian Koreksi Persediaan 31 Desember 2023
dan 2022*

Jenis Persediaan	Jumlah Koreksi
Barang Konsumsi	0
Persediaan peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat	0
Jumlah Nilai Koreksi	0

*Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi
(Rp.3.362.974.747)*

E.3.5 Koreksi Aset Non Revaluasi

Koreksi Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar (Rp.3.362.974.747) dan Rp114.024.839. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

*Koreksi Lain-Lain
Rp1.757*

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp1.757 dan Rp 0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara antara lain koreksi atas pendapatan koreksi atas beban koreksi atas hibah piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	1.757
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
Jumlah	1.757

*Transaksi Antar
Entitas
Rp20.299.169.3 09*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp20.299.169.309 dan Rp12.775.489.789. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL antar KL antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	2023	2022
Diterima dari Entitas Lain	(1,372,564,074)	(951,831,323)
Ditagihkan ke Entitas Lain	19,803,584,383	13,331,436,532
Transfer Masuk	1,868,149,000	395,884,580
Transfer Keluar		-
Pengesahan Hibah Langsung		-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung		-
Jumlah	20,299,169,309	12,775,489,789

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023 dan 2022, DDEL sebesar (Rp1.372.564.074) dan (Rp.951.831.323) sedangkan DKEL sebesar Rp19.803.584.383 dan Rp.13.331.436.532.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp.1.868.149.000 Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 0.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Sampai tanggal pelaporan 31 Desember 2023 terdapat 11 kali Revisi DIPA yaitu:

1. Revisi Pertama

- Pemblokiran anggaran Automatic Adjustment Terkait Kegiatan Rehabilitasi Peninggian Gedung Kantor Utama PPS Belawan Senilai Rp. 777.942.000,-

2. Revisi Kedua

- Pemblokiran anggaran terkait :
 - ✓ Pengadaan Batu Timbangan/Anak Timbangan Senilai Rp. 300.000,-
 - ✓ Tera Timbangan Senilai Rp. 6.400.000,-
 - ✓ Pengadaan Meubleair Senilai Rp. 140.255.000,-
 - ✓ Pengadaan Meja Sortir Seaniali Rp. 15.250.000,-
 - ✓ Pengadaan Baterai/Aki Timbangan Senilai Rp. 8.000.000,-
 - ✓ Pengadaan Handy Talky Senilai Rp. 5.100.000,-

3. Revisi Ketiga

- Revisi Update Halaman III DIPA Triwulan I
- Perubahan Kegiatan Sosialisasi Keselamatan Pelayaran ke Tanjung Balai
- Sosialisasi Keselamatan Pelayaran (PP Balerang)
- Penambahan terkait Kegiatan Kebijakan Penegakkan Hukum
- Revisi Terkait Evaluasi SHTI di Medan
- Revisi Terkait Evaluasi SHTI di Deli Serdang
- Penambahan anggaran di kegiatan Penggandaan Laporan di akun 2338.BGA.002.053.A.521211
- Penambahan anggaran di kegiatan Monitoring Evaluasi Penerbitan Cara Penanganan Ikan yang Baik Senilai Rp. 9.105.000,-
- Penambahan anggaran di kegiatan Bimtek Keterampilan Cara Penanganan Ikan yang Baik Awal Kapal Perikanan di Kec. Pantai Cermin Senilai Rp. 9.307.000,-
- Revisi anggaran terkait kegiatan Bimtek Keterampilan Cara Penanganan Ikan yang Baik Awak Kapal

- Perikanan ke (Kec.Rugemuk) senilai Rp. 9.105.000,-
- Revisi anggaran di kegiatan Bimtek Keterampilan Cara Penanganan Ikan Yang Baik Awak kapal Perikanan ke Batu Bara senilai Rp. 2.994.000,-
 - Penambahan anggaran di kegiatan Bimtek Keterampilan Cara Penanganan Ikan Yang Baik Awak kapal Perikanan ke Kabupaten Langkat senilai Rp. 9.107.000,-
 - Revisi anggaran terkait Bimtek Keterampilan Cara Penanganan Ikan Yang Baik Awak kapal Perikanan ke Pangkalan Brandan senilai Rp. 10.995.000,-
 - Penambahan anggaran di kegiatan Bimtek Keterampilan Cara Penanganan Ikan Yang Baik Awak kapal Perikanan ke Tanjung Balai senilai Rp. 6.111.000,-
 - Revisi anggaran terkait Bimtek Keterampilan Cara Penanganan Ikan Yang Baik Awak kapal Perikanan ke Aceh (Tapak Tuan) senilai Rp. 14.130.000,-
 - Revisi anggaran terkait Bimtek Keterampilan Cara Penanganan Ikan Yang Baik Awak kapal Perikanan ke Banda Aceh senilai Rp. 20.160.000,-
 - Revisi anggaran terkait Bimtek Keterampilan Cara Penanganan Ikan Yang Baik Awak kapal Perikanan ke Aceh (Simeulue) senilai Rp. 6.000.000,-
 - Revisi anggaran terkait Kegiatan Surveillance dan Perpanjangan Sertifikat Cara Penangkapan Ikan yang Baik di medan, langkat dan deli Serdang
 - Penambahan anggaran di kegiatan Workshop HACCP senilai Rp. 6.000.000,-
 - Revisi Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor senilai Rp. 35.037.000,-
 - Penambahan anggaran Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Utama senilai Rp. 35.037.000,-
 - Pengurangan anggaran antara lain :
 - ✓ Pengadaan Scanner senilai Rp. 9.900.000,-
 - ✓ Pengadaan Pengindraan JarAK Jauh senilai Rp. 44.372.000,-
 - Penambahan anggaran antara lain :
 - ✓ Pengadaan Alat Pengolah Data Untuk Drone senilai Rp. 7.272.000,-
 - ✓ Pengadaan Alat Pengolah Data senilai Rp. 21.000.000,-
 - ✓ Pengadaan AC senilai Rp. 26.000.000,-
 - Penambahan anggaran terkait Transport Peserta

- Sosialisasi Pelaksanaan E-LBPI senilai Rp. 1.000.000,-
- Penambahan anggaran Perjalanan Menghadiri Rateknis Logbook Penangkapan Ikan Rp. 3.500.000,-
- Pengurangan Biaya Pajak Bumi Bangunan senilai Rp. 19.193.000,-
- Penambahan anggaran untuk kegiatan Pengadaan Lisensi Aplikasi Video Conference senilai Rp. 300.000,-
- Penambahan anggaran Listrik senilai Rp. 55.560.000,-
- Penambahan anggaran Pakaian Dinas Pegawai/Perawat (Sumatera Utara) [55 ORANG x 2 STELL] senilai Rp. 1.680.000,-
- Penambahan anggaran Pakaian Kerja Pengemudi/Petugas Kebersihan/Pramubakti/Pesuruh (Sumatera Utara) [37 ORANG x 2 STELL] Rp. 9.600.000,-
- Pengurangan Pakain Dinas Lapangan [103 Orang x 1 STELL] senilai Rp. 67.000,-
- Penambahan anggaran Pakaian Dinas Upacara [103 ORANG x 1 STELL] Rp. 14.280.000,-
- Penambahan anggaran di kegiatan Kegiatan Internalisasi Zona Integritas dan Budaya Pelaksanaan Pelayanan Prima senilai Rp. 48.960.000,-
- Pengurangan anggaran terkait Pemeliharaan Pagar senilai Rp. 10.000.000,-
- Penambahan anggaran terkait Pemeliharaan Kanstin senilai Rp. 10.000.000,-
- Pengurangan anggaran terkait Pengadaan Sepeda senilai Rp. 15.000.000,-
- Penambahan anggaran Pengadaan Meubelair senilai Rp. 15.000.000,-

4. Revisi ke empat

- Update Halaman III DIPA Triwulan II
- Penambahan anggaran terkait Evaluasi Penerapan PP No. 85 Tahun 2021 Untuk Pelayanan Jasa Atas PNBP senilai Rp. 7.210.000,-
- Pengurangan anggaran terkait Sosialisasi Pengusahaan SIJAKA SIPAUS senilai Rp. 7.210.000,-
- Revisi terkait Renovasi Toilet Dalam Rangka Mendukung Kegiatan PIT
- Revisi terkait Pembangunan Papan Nama Kantor
- Revisi terkait Rehabilitasi Peninggian Gedung Kantor Utama PPS Belawan senilai
- Pengadaan Kendaraan Roda Empat Fungsional senilai Rp. 927.858.000

- Penambahan anggaran di kegiatan sertifikasi Garda Pratama senilai Rp. 54.000.000,-

5. Revisi Kelima

- Perlengkapan Kerja Petugas Kesyahbandaran;
- Penambahan Kegiatan Kebijakan Hukum;
- Revisi Terkait Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
- Revisi Terkait Pemeliharaan Jaringan
- Revisi Terkait Perlengkapan Keamanan
- Penambahan Anggaran Terkait Pemeliharaan Roda Tiga;
- Penambahan Honorarium Narasumber di Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan K3 di Kawasan Pelabuhan;
- Penambahan Honorarium Narasumber di Kegiatan Pelatihan Peningkatan Ketrampilan Petugas Keamanan;
- Penambahan Perjalanan Dinas Perjalanan dinas dalam rangka PIT ke pelabuhan binaan;
- Penambahan Transport lokal dalam rangka pelaksanaan PNBP Pasca Produksi;
- Revisi Terkait Rapat Koordinasi WPPNRI 571 di Aceh;
- Revisi Terkait Gaji dan Tunjangan;
- Revisi Terkait Operasional dan Pemeliharaan Kantor;
- Revisi Terkait Outsourcing Perorangan Tenaga Pramubakti dan Pengamanan Sumatera Utara;
- Penambahan Pakaian Dharma Wanita Persatuan;
- Penambahan Pembuatan Gazebo;
- Penambahan Belanja Modal dan Peralatan seperti :Pengadaan AC, Laptop, PC Komputer, Printer, Kamera, Sepeda Motor , Speaker yang bersumber dari dana PNBP;
- Revisi Terkait Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Penerapan Disiplin Pegawai.

6. Revisi Keenam

- Pemblokiran anggaran terkait :Sarana Pelabuhan Perikanan Mendukung Pelaksanaan PIT Pengadaan Sarana Penunjang Operasional Pelabuhan Perikanan di akun 2338.RAL sebesar Rp. 175,305,000.

7. Revisi Ketujuh

- Penambahan Perjalanan Dinas Terkait Perjalanan dinas dalam rangka Pemeriksaan Kelaikan/Pengukuran/Pengujian/Inspeksi Kapal Perikanan;
- Penambahan Perlengkapan Kerja Petugas Kesyahbandaran;
- Penambahan Perjalanan Dinas ke Pusat Dalam Rangka Konsultasi dan Koordinasi;
- Penambahan Perjalanan Dinas Dalam Rangka E-PIT ke Pelabuhan binaan;
- Dihapus kegiatan Sosialisasi Tertib Bandar (PP Balerang);
- Revisi Terkait Desiminasi Regulasi Kesyahbandaran dan Aplikasi Teman SPB di Pelabuhan Perikanan;
- Dihapus Kegiatan Kesyahbandaran dalam penerapan PNBP Pasca Produksi di Pelabuhan Perikanan;
- Penambahan di Kegiatan Perlengkapan Kerja Petugas S-CPIB;
- Dihapus Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerbitan Cara Penanganan Ikan yang Baik;
- Pengurangan di kegiatan Belanja Bahan Publikasi;
- Dihapus kegiatan Pelaksanaan Pengamanan Terpadu PNBP Pascaproduksi;
- Penambahan Uang Lembur Petugas Pendataan Produksi Ikan;
- Penambahan Perjalanan Dalam Rangka Konsultasi dan Koordinasi;
- Penambahan Pengadaan Sepeda Listrik;
- Penambahan Uang Makan Lembur Pengadministrasi Kegiatan Eco Fishing Port;
- Revisi Perihal Gaji dan Tunjangan;
- Penambahan Uang Makan Lembur Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti
- Penambahan Anggaran di Pengadaan Pakaian Dinas;
- Pengurangan kegiatan di Pemeliharaan AC Floor Standing dan Operasional Genset;
- Pengurangan Penambah Daya Tahan Tubuh;
- Penambahan Amggaran di Perjalanan Dalam Rangka Pengembangan SDM;
- Penambhan Anggaran Pemeliharaan Tandon dan Pemeliharaan Drainase;
- Pengurangan Pengadaan AC .

8. Revisi ke 8

- Revisi Pengembalian Anggaran Terkait Blokir Automatic Adjustment Sebesar Rp. 777.942.000;

9. Revisi Kesembilan

- Revisi Terkait Pengembalian Gaji

10. Revisi Kesepuluh

- Update Halaman III DIPA
- Revisi Terkait_Perlengkapan Kerja Petugas Kesyahbandaran;
- Revisi Terkait_Cetak Blangko Belawan, Tanjung Balai, Pussong (SPB,STLBKK,DAFTAR ABK,PERMOHONAN SPB)
- Revisi Terkait Sosialisasi Keselamatan Pelayaran ke Tanjung Balai
- Revisi Terkkait Desiminasi Regulasi Kesyahbandaran dan Aplikasi Teman SPB di Pelabuhan Perikanan
- Revisi Terkait Operasional Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Sesuai SK Dirjen
- Revisi Terkait Sampel Ikan
- Revisi Terkait Perlengkapan Kerja Petugas S-CPIB
- Revisi Terkait Bimtek Keterampilan Cara Penanganan Ikan Yang Baik Awak kapal Perikanan ke Batu Bara
- Penambahan Anggaran Terkait Pemeliharaan Jaringan Listrik Lampu Jalan
- Penambahan Anggaran Perlengkapan Kerja Petugas Pelayanan Usaha
- Revisi Terkait Sosialisasi Pengusahaan SIJAKA SIPAUS
- Penambahan Anggaran Perlengkapan Kebersihan dan Keamanan
- Revisi Terkait Pemeliharaan dan Operasional Dump Truck
- Revisi Terkait Perjalanan Dalam Rangka Konsultasi dan Koordinasi
- Revisi Terkait Jumat Bersih
- Revisi Terkait Uang Lembur Petugas Pendataan Produksi Ikan
- Revisi Terkait Kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Pengembangan (Design and Build) dan Persiapan Loan Agreement oleh PPS Belawan
- Penambahan Anggaran Pengadaan Perlengkapan
- Revisi Terkait Gaji dan Tunjangan

- Revisi Terkait Operasional dan Pemeliharaan Kantor

11. Revisi Kesebelas

- Revisi Terkait Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan Kelaikan/Pengukuran/Pengujian/Inspeksi Kapal Perikanan
- Revisi Terkait K5 DI PELABUHAN PERIKANAN
- Revisi Terkait Pengadaan dan Peralatan Mesin
- Revisi Terkait Kegiatan Operasionalisasi Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI dalam mendukung Penangkapan Ikan Terukur
- Revisi Terkait Sosialisasi Pengumpulan Dan Verifikasi Data Logbook Penangkapan Ikan
- Revisi Terkait Layanan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- Revisi Terkait Layanan Data Statistik Kelautan dan Perikanan
- Revisi Terkait Gaji dan Tunjangan
- Revisi Terkait Operasional dan Pemeliharaan Kantor
- Revisi Terkait Layanan Manajemen SDM
- Revisi Terkait Perencanaan Anggaran
- Revisi Terkait Layanan Manajemen Keuangan

F.2 Temuan Dan Tindak Lanjut Temuan Bpk

Untuk Badan Pemeriksa Keuangan tidak ada temuan satker Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan.

F.3 Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan adalah Bank Negara Indonesia (Tbk), Kantor Cabang Belawan Si Nomor **9890394276551000** a.n. BPG 123 PPS BELAWAN.

F.4 Pengungkapan Lain-Lain

✚ Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 1/MEN-KP/KU.110/2024 Tentang Perubahan Kelima Puluh Sembilan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.79/MEN/KU.611/2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 04 Januari 2024 adalah sebagai berikut :

Nama : Ir.Mansur,MM
NIP : 19660312 199103 1 002
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda /IVc
Jabatan : Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Belawan

✚ Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : B.23/PPS.BLW/KU.611/I/2023 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan pada tanggal 04 Januari 2024 adalah sebagai berikut :

Nama : Ir.Nurmaidia Silaen,M.Si
NIP : 19681108 199403 2 004
Pangkat/Gol : Pembina /IVa
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

Nama : Sumuriaty Simanjuntak,SM
NIP : 19710513 200003 2 003
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk I /IIIb
Jabatan : Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar

✚ Berdasarkan Keputusan Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan Nomor : B.22/PPS.BLW/KU.611/I/2023 Tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Dan/atau Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan pada tanggal 04 Januari 2024 adalah sebagai berikut :

Nama : Dewi Bungara Manik,SE
NIP : 19840710 200901 2 002
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I/IIIb
Jabatan : Bendahara Pengeluaran

Nama : Lingkol Ritonga
NIP : 19801005 200502 1 003
Pangkat/Gol : Penata Muda/IIIa
Jabatan : Bendahara Penerimaan

- ☆ SELESAI HASIL REKONSILIASI (SHR)
- ☆ LAPORAN REALISASI ANGGARAN
- ☆ NERACA
- ☆ LAPORAN OPERASIONAL
- ☆ LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
- ☆ NERACA PERCOBAAN
- ☆ NERACA SIMAK BMN